

Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam

Saifudin^{1*} & Didin Saepuddin²

¹Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

²Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*saifudin@uinjkt.ac.id

Abstract

This article discusses the impact of Japanese colonialism on Islamic education, namely on how Islamic education was held during the Japanese period. The writing of this research is qualitative research. The methodology and approach used are historical analysis and content analysis. The main source of research is books on the history of Islamic education written by actors of the history of Japanese colonialism and other relevant books. This article concludes that Japanese colonialism has influenced the system, goals, form, appearance and curriculum of Islamic education. This influence did not only occur during the Japanese colonialism or occupation, but also continues to this day. The influence of Japanese colonialism on Islamic education, among other things, changed the aim of Islamic education from fulfilling the happiness of the world and the hereafter to the fulfillment of worldly needs only. The spiritual aspect (hereafter) is considered unimportant and needed in education, because it is considered to not affect increasing one's happiness in the world.

Keywords: colonialism; Japan; Islamic education

Abstrak

Artikel ini membahas dampak penjajahan Jepang atas Pendidikan Islam yaitu mengenai bagaimana pendidikan Islam diselenggarakan pada masa Jepang. Penulisan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metodologi dan pendekatan yang digunakan adalah analisis historis dan analisis isi (*content analysis*). Sumber utama penelitian buku-buku sejarah pendidikan Islam yang ditulis para pelaku sejarah penjajahan Jepang dan buku-buku lain yang relevan. Artikel ini menyimpulkan bahwa kolonialisme Jepang telah memengaruhi sistem, tujuan, bentuk, rupa, dan kurikulum pendidikan Islam. Pengaruh tersebut tidak hanya terjadi pada masa kolonialisme atau penjajahan Jepang, tetapi juga berlangsung hingga hari ini. Pengaruh kolonialisme Jepang atas pendidikan Islam, antara lain, mengubah tujuan pendidikan Islam dari tujuan pemenuhan kebahagiaan dunia dan akhirat diubah menjadi pemenuhan kebutuhan duniawi semata yang bersifat jasadi. Adapun aspek rohani (akhirat) dianggap tidak penting dan dibutuhkan dalam pendidikan, karena dianggap tidak berpengaruh pada peningkatan kebahagiaan hidup seseorang di dunia.

Kata Kunci: kolonialisme; Jepang; Pendidikan Islam

Diserahkan: 19-09-2020 **Disetujui:** 30-09-2020. **Dipublikasikan:** 01-10-2020

Kutipan: Saifudin & Saepuddin D. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164-177. doi:<http://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3441>

I. Pendahuluan

Tak diragukan lagi, bahwa Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2), adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Peristiwa ini merupakan titik awal bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Perang ini melibatkan banyak negara di dunia, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan: Sekutu (AS, Inggris, Cina, Belanda, dan lain-lain) dan Poros (Jerman, Jepang dan Italia). Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang dari pelbagai pasukan militer lintas negara.

Hal tersebut terjadi, karena dalam perang terdapat aspek penjajahan atau kolonialisme. Yakni usaha menguasai wilayah, politik, dan ekonomi kawasan tertentu. Selain itu, pada kolonialisme terdapat penguasaan pola pikir manusia (Smith, 1980, hlm. 69). Demikian halnya dalam PD II. Pada perang ini terjadi kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan penggunaan senjata nuklir dalam peperangan. Akibat perang ini, sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa jadi korban perang. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia (Sommerville, 2008, hlm. 5).

Masih dalam masa perang, tanggal 8 Desember 1941 merupakan hari bersejarah bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Saat itu pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Hindia Belanda harus dapat menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang.

Sikap tersebut dipertegas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke dalam Front Sekutu dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang berkedudukan di Bandung.

Angkatan perang Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang. Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Pasifik ini diberi nama Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat, Jepang dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Thailand, Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Penanggalan dua kapal induk Inggris, yaitu Prince of Wales dan HMS Repulse, oleh tentara Jepang pada 15 Februari 1942, merupakan titik awal jatuhnya Singapura ke tangan Jepang. Peristiwa itu sangat mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan Sekutu meninggalkan Indonesia, sampai Belanda terdesak dan Indonesia jatuh ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan Sekutu di bawah pimpinan Karel Doorman dari Belanda dapat mengadakan perlawanan dengan pertempuran di Laut Jawa, meskipun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.

Secara kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia dimulai dengan menduduki Tarakan pada 10 Januari 1942, kemudian meluas ke Minahasa, Balikpapan, dan Ambon. Selanjutnya pada bulan Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang, serta Bali.

Ketika tiba di Tanah Air, Jepang lebih mengutamakan Palembang sebagai tempat pendudukan. Atas perintah Jenderal Imamura, Panglima Tertinggi tentara pendudukan Jepang, Soekarno saat itu yang berada di Pulau Jawa, diminta menuju Palembang melalui kapal laut. Di kota ini, ia banyak mengalami kesulitan (Adams, 2007, hlm. 201–207).

KH. Saifudin Zuhri, tokoh *jam'iyah* Nahdlatul Ulama (NU), menjelaskan, sebelum mendarat ke Indonesia, berbulan-bulan Radio Tokyo menggemakan lagu kebangsaan Indonesia yang ditujukan kepada bangsa Indonesia dalam siaran-siaran radionya. Hal itu dilakukan untuk mengambil hati dan merayu bangsa Indonesia, bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia.

Bahkan, cerita tentang kemerdekaan Indonesia itu beredar dari mulut ke mulut, meski pada akhirnya Jepang hanyalah ingin meninabobokan bangsa Indonesia. Buktinya, setelah tentara Jepang menguasai Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia tidak diputar lagi, dan diganti dengan lagu kebangsaan Jepang *Kinigayo*. Parahnya lagi, lagu itu diwajibkan didengarkan dan dihafal bangsa Indonesia (Zuhri, 2001, hlm. 261–262).

Seperti dikisahkan mantan veteran dan pengurus Partai Umat Islam (PUI) Mochtar Effendy dalam otobiografinya, *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan*, ketika datang ke Palembang, tentara Jepang mendarat dengan terjun payung. Saat itu pula, kaum pergerakan menuntut kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sudah tak berdaya, agar bangsa Indonesia diberi hak berparlemen sendiri dan wajib militer (*militieplicht*) untuk menghadapi fasisme Jerman, Italia, dan Jepang (Effendy, 2002, hlm. 41).

Namun sayang, dengan kecut pemerintah Hindia Belanda menolak mentah-mentah dua tuntutan tersebut, dengan alasan rakyat Indonesia belum matang dalam berpolitik maupun dalam perang. Sikap itu memang menyesakkan bagi rakyat Indonesia, karena saat itu negeri Belanda sendiri sudah dalam pendudukan tentara Jerman, tapi enggan mengabulkan tuntutan itu.

Bagi Jepang, pendudukan terhadap Palembang didahulukan, itu mempunyai arti yang sangat penting dan strategis. Yaitu untuk memisahkan antara Batavia (Jakarta) yang menjadi pusat kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat pendudukan Inggris.

Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) dan akhirnya

pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Besar Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang.

Dengan demikian, tak terbantahkan lagi bahwa pendudukan Jepang ke wilayah Indonesia tentu berimplikasi pada hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi saat itu, Jepang dikenal lebih fasis daripada Belanda. Pendudukan tentara negara Jepang ke berbagai negara lain dinilai hanya untuk kepentingan ekspansi wilayah politik perang dan kekuasaan dengan cara-cara militeristis.

Karena itu pula, dapat dipastikan bahwa sejak Jepang menguasai wilayah Indonesia, secara otomatis kehidupan dan nasib bangsa Indonesia berada di bawah bayang-bayang kekuasaan tentara pendudukan Jepang.

Dalam hal ketatanegaraan, misalnya, Jepang mengubah peranan dan menurunkan posisi kesultanan Yogyakarta. Menjelang Jepang datang ke Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta bersifat mandiri dan punya wilayah luas. Tetapi, ketika Jepang sudah berada di kota ini, Kesultanan Yogyakarta hanya meliputi keraton dan empat kabupaten saja. Sementara posisi Gubernur Hindia Belanda juga turun posisinya menjadi Residen Yogyakarta, berada di bawah koordinasi Gubernur Semarang (Suwarno, 1994, hlm. 90–92).

Tidak hanya tata kelola pemerintahan. Jepang juga berusaha menguasai bidang pendidikan Islam bangsa Indonesia. Dalam hal yang satu ini, Jepang secara sporadis dan hegemonik membumihanguskan sistem pendidikan Islam, yang meliputi aspek kurikulum, kelembagaan, sarana-prasarana, kiai, guru, murid, dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk menundukkan dan menjinakkan bangsa Indonesia, Jepang tidak saja menutup sekolah-sekolah modern seperti Sekolah Schakel Muhammadiyah, tetapi secara bertahap juga melarang sekolah agama atau madrasah (Effendy, 2002, hlm. 44).

Demikian pula sikap Jepang kepada pesantren. Pada awal masa pendudukan, Jepang bersitegang dengan pendiri *jam'iyah* NU KH Hasyim Asyari,- yang pada gilirannya juga diikuti oleh kiai-kiai yang lain- atas praktik *Saekere* (penghormatan terhadap Kaisar Jepang Taeno Haika, yang dianggap sebagai keturunan dewa Ameraterasu), dengan cara membungkukkan badan 90 derajat ke arah Tokyo dari pukul 07.00 sampai mereka ditangkap dan dipenjara Jepang.

Menanggapi kekejaman itu, ribuan santri bereaksi dengan berdemonstrasi ke penjara, dan membangkitkan semangat jihad menentang Jepang melalui gerakan bawah tanah (Qomar, 2006, hlm. 13–14). Demonstrasi itu rupanya menyadarkan Jepang, bahwa Kiai Tebuireng, Jombang, Jawa Timur- yang jadi panutan kiai-kiai di Tanah Air-, itu

mempunyai magnet dan kharisma tersendiri bagi para santrinya. Karena itu tak lama kemudian, Jepang membebaskan KH Hasyim Asyari dari penjara. Di sini Jepang pun merasa salah besar dalam upaya merekrut dan mengambil simpati umat Islam sebagai tenaga paramiliter.

Untuk memutus keterkaitan dengan pola pikir Barat (Belanda), Jepang membersihkan kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam diganti kebudayaan Jepang. Langkah yang dilakukan adalah menjadikan bahasa Jepang sebagai *lingua franca* (bahasa resmi) melalui pemakaian istilah-istilah resmi bahasa Jepang, penerbitan koran disediakan kolom pelajaran Jepang, buku-buku teks memakai bahasa Jepang. Madrasah yang bahasa pengantarnya bahasa Arab ditutup dan dilarang diajarkan di pesantren, walaupun akhirnya larangan itu dicabut akibat kerasnya tantangan umat Islam (Sunanto, 2007, hlm. 36).

Tentu sikap dan kebijakan Jepang ini berbeda dengan Belanda yang masih menoleransi sejumlah madrasah dan pesantren- karena kebijakan politik etis pemerintah Hindia Belanda. Kolonialisme Jepang seolah tak mengizinkan bangsa Indonesia maju, menjadi manusia terdidik (*educated people*) dan mendapatkan hak-hak pendidikan.

Meski demikian, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan tulisan ini, tentara Jepang pada akhirnya mengembalikan eksistensi dan posisi pendidikan Islam kepada umat Islam sesuai khitahnya. Selain itu, pada masa pendudukan Jepang pula bangsa Indonesia bebas berekspresi dalam menjalankan keyakinan beragama maupun dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan lain-lainnya.

Dari latar belakang di atas, kajian dan penelitian tentang pengaruh penjajahan Jepang atas Pendidikan Islam menarik untuk dikaji kembali. Di sini akan terlihat, bagaimana pendidikan Islam dapat bertahan melawan kekejaman Jepang. Demikian pula akan tergambar, apa dan bagaimana umat Islam menyelenggarakan pendidikan Islam di saat bangsa ini dijadikan alat militer tentara pendudukan Jepang.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengetahui pengaruh atau efek sosial dan respons Pendidikan Islam atas penjajahan Jepang di Indonesia. Dari rumusan ini diharapkan terdapat deskripsi historis analisis yang jelas tentang sikap masyarakat Muslim atas penjajahan Jepang.

II. Metodologi Penelitian

Metode kajian penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji narasi gagasan pada fenomena sosial yang terjadi pada Pendidikan Islam pada masa kolonialisme Jepang. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji objek kajian penelitian adalah analisis historis. Pendekatan deskriptif historis adalah

sebuah metode yang bertujuan mengungkap dan menjelaskan peristiwa di masa lalu (Margiono, 2005, hlm. 52; Sudjana, 1991, hlm. 36–37).

Selain itu, agar gagasan yang terdapat pada fenomena sosial politik tersebut dapat terbaca dengan baik, pendekatan analisis isi juga digunakan pada penelitian ini. Analisis isi dapat diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks (objek sosial).

Data-data yang dijadikan rujukan atau referensi pada pembahasan tema ini berupa buku-buku sejarah pendidikan yang relevan dengan tema pokok, khususnya dari buku-buku yang ditulis oleh para pelaku sejarah penjajahan Jepang. Sumber-sumber informasi dari data-data tersebut diolah, dianalisis, dan disimpulkan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pendidikan Islam di masa penjajahan Jepang

Sebelum Jepang menguasai wilayah Indonesia, sistem kelembagaan dan pembelajaran pendidikan di Tanah Air terdiktomi pada sekolah umum dan sekolah agama. Sekolah-sekolah umum pada umumnya mengikuti pola pendidikan Belanda. Sedangkan sekolah-sekolah agama merupakan bentuk dan pola orisinal dari para ulama. Selain itu terdapat pula diskriminasi sekolah-sekolah bagi pribumi (Boemiputra), bangsa China, Arab, dan warga Hindia Belanda, serta keturunan bangsawan. Sekolah-sekolah diselenggarakan mengikuti (ordonansi) sistem pendidikan di negeri Belanda (Jalaluddin, 1995).

Semenjak Jepang datang, banyak sekolah dan madrasah ditutup. Bahkan di antara sekolah dan madrasah itu ditutup sendiri oleh para pendiri dan gurunya, karena takut dan untuk menghindari upacara *Saekere* (membungkukkan badan ke arak Tokyo) sebagai kewajiban untuk menghormati Kaisar Tenno Haika setiap pagi. Ritual ini tidak saja menyakitkan umat Islam, tapi juga dinilai sebagai bentuk kesirikan (Effendy, 2002, hlm. 44–45). Mereka yang menolak ritual tersebut akan dipukul, dihardik dan dicaci-maki.

Pada masa awal pendudukan, hampir semua sekolah dan madrasah berhenti aktivitasnya. Jika ditemukan madrasah atau pesantren yang masih menjalankan aktivitas pembelajaran, itu terjadi karena mereka luput dari intel Jepang. Atau boleh jadi karena dalam pembelajarannya hanya mengajarkan kehidupan sufi dalam pengertian menghindari dari hiruk-pikuk masalah-masalah kebangsaan seperti dialami Madrasah Ahliyah 26 Iilir. Lantaran itu pula, madrasah ini hingga akhir 1944 masih dapat beroperasi, meski dengan jumlah murid yang kian sedikit.

Setelah sekolah dan madrasah ditutup, maka pola pendidikan Islam berubah dalam bentuk *halaqah* dengan guru yang berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di rumah-rumah para guru (Effendy, 2002, hlm. 45).

Banyak di antara mereka yang ingin melanjutkan studi lanjut ke Mesir atau Mekah Arab Saudi, sesudah tamat dari mengaji satu kitab atau satu jenjang pendidikan, Namun, mereka takut keluar, karena khawatir ditangkap untuk dipaksa menjadi anggota Badan Pembantu Peperangan (BPP). Di badan ini, para pemuda jadi kuli pertahanan militer Jepang dan tidak diberi makan.

Proses pembelajaran model *halaqah*, ternyata tak berlangsung lama. Alasannya, seperti dijelaskan di muka, tentara Jepang salah strategi dan taktik dalam mengambil hati bangsa Indonesia.

Maka, sesuai dengan Oendang-oendang Nomor 12 tertanggal 22 April 1942, sekolah dan madrasah yang semula ditutup, secara berangsur-angsur dibuka kembali. Tepat pada 1 Juni 1942, Sekolah Rakyat yang pertama kali dibuka adalah HIS Djagamonjet, HIS Gastenweg, HIS Baloelweg, Jatinegara. Jumlah muridnya sebanyak 966 orang. Ini menunjukkan minat yang besar dari masyarakat Indonesia untuk belajar.

Meskipun singkat, berlangsung pada tahun 1942-1945, masa pendudukan Jepang memberikan corak yang berarti pada pendidikan di Indonesia. Tidak lama setelah berkuasa, Jepang segera menghapus sistem pendidikan warisan Belanda yang didasarkan atas penggolongan menurut ras, kebangsaan, dan status sosial. Tingkat sekolah terendah adalah Sekolah Rakyat (SR) yang dalam bahasa Jepang disebut *Kokumin Gakko*. Sekolah ini terbuka untuk semua golongan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan asal-usulnya.

Selanjutnya, pada bulan Agustus 1942, sejumlah sekolah menengah pun dibuka kembali. Misalnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 di Prapatan 10, SMP II di Gambir Wetan, dan SMP III di Raya Straat Manggarai. Selain itu dibuka pula Sekolah Menengah Tinggi (sekarang, SMA) di Menteng (Hasbullah, 2001, hlm. 64; Posponegoro & Notosusanto, 1993, hlm. 95). Lama belajar di sekolah-sekolah ini 3 tahun.

Tiga jenjang pendidikan inilah yang kemudian dianut dalam sistem pendidikan nasional, yakni SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA juga 3 tahun. Demikian pula terhapus sistem dikotomi dan konkordansi pendidikan antara penduduk pribumi dengan bangsa lain.

Pada giliran selanjutnya, sekolah-sekolah bekas Hindia Belanda, sekolah-sekolah swasta dan sekolah Agama Islam, misalnya, sekolah-sekolah Muhammadiyah, Sekolah Taman Siswa, dan sekolah-sekolah zending yang dikelola oleh dan untuk misionaris, juga diperbolehkan beroperasi kembali.

Dengan penerbitan *Osamo Seirei* No. 22/2604 (1944), tentang pendirian sekolah-sekolah swasta, hak pendirian dan pembukaan itu diberikan kepada Jawa Hokokai. Lembaga ini mendapat mandat ini, karena ia merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Jepang dalam perang. Sementara sekolah swasta lain hanya diberikan membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Sekolah-sekolah ini dibuka juga untuk kepentingan tenaga pendidik bagi kepentingan Jepang (Posponegoro & Notosusanto, 1993, hlm. 95).

Pada masa pendudukan Jepang, ada satu hal istimewa dalam pendidikan sebagaimana telah dikemukakan, yaitu sekolah-sekolah telah diseragamkan dan dinegerikan meskipun sekolah-sekolah swasta lain, seperti Muhammadiyah, Taman Siswa dan lain-lain diizinkan terus berkembang dengan pengaturan dan penyelenggaraan oleh pendudukan Jepang.

Di sisi lain, madrasah-madrasah dibangun dengan gencar selagi ada angin segar yang diberikan oleh Jepang. Walaupun lebih bersifat politis belaka, kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja dan umat Islam Indonesia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ini tampak di Sumatera dengan berdirinya madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi.

Hampir seluruh pelosok perdesaan dapat ditemukan Madrasah Awaliyah yang dikunjungi banyak anak-anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliyah ini diadakan pada sore hari dengan waktu kurang satu setengah jam. Materi yang diajarkan ialah membaca Alquran, ibadah, akhlak dan keimanan sebagai pelatihan pelajaran agama yang dilakukan di sekolah rakyat pagi hari (Yunus, 1996, hlm. 121–123).

Oleh karena itu, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya setiap harinya hanya disuruh gerak badan, baris-berbaris, kerja bakti (*romusha*), bernyanyi dan sebagainya, madrasah-madrasah yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren dapat berjalan dengan wajar (Mustafa & Ally, 1998, hlm. 110).

Namun sayang kebijakan Jepang itu tidak diberlakukan pada perguruan tinggi. Pada masa ini seluruh perguruan tinggi ditutup. Baru pada awal 1943, Jepang membolehkan Perguruan Tinggi Kedokteran (*Ika Daigaku*) di Jakarta, Perguruan Tinggi Teknik (*Kogyo Daigaku*) di Bandung dan Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor. Sedangkan khusus kaum perempuan disediakan Sekolah Kepandaian Poetri "Wakaba" (Mustafa & Ally, 1998, hlm. 96).

Sedangkan untuk Perguruan Tinggi Islam, Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta (Zuhairini, 1995). Dengan kondisi seperti itu, maka secara akademik di masa Jepang Perguruan Tinggi Indonesia mengalami kemunduran.

Meski demikian, penggunaan kembali bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan kehidupan sosial, telah membuat bangsa Indonesia bangga, serta lahirnya nasionalisasi staf pengajar, serta pembentukan kader-kader muda menjelang kemerdekaan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran dilakukan pada semua tingkatan, meskipun bahasa Jepang pun wajib diajarkan (Zuhairini, 1995).

Kondisi tersebut tentu berbeda di masa penjajahan Belanda, di mana ketika itu bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar bagi para pelajar di sekolah-sekolah atau madrasah, baik bagi warga Hindia Belanda maupun untuk kaum boemi poetra yang ingin di-Belanda-kan.

Seiring dengan hal itu, bahasa penggunaan bahasa Belanda juga dimaksudkan sebagai usaha mempersiapkan kalangan bumiputra untuk melanjutkan belajar di negeri Belanda, sehingga di kemudian hari kaum bumiputra mempunyai budaya dan pola pikir sebagai orang Belanda (Dhakidie, 2003, hlm. 92–95).

Dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dan madrasah, serta menjadi bahasa ilmiah, maka di sinilah proses demokratisasi pendidikan dimulai. Pendidikan tidak hanya dinikmati dan dimiliki kaum bangsawan, tetapi juga menjadi hak seluruh warga masyarakat.

Pada proses selanjutnya penggunaan bahasa Belanda dihilangkan oleh tentara Jepang (Tilaar, 1995, hlm. 51-52.). Dengan peristiwa ini, bangsa Indonesia dapat melakukan nasionalisasi atas diri dan negaranya. Selain itu gap antara kaum bangsawan dan rakyat biasa, - karena penguasaan bahasa Belanda, - semakin berkurang.

Usaha penanaman ideologi *Hakko Ichiu* melalui sekolah dan madrasah dimulai dengan mengadakan pelatihan guru-guru. Ideologi ini meyakini, bahwa Jepang adalah penguasa Asia Raya. Secara teologis, keyakinan itu ditunjukkan dengan klaim Kaisar Tenno Haika sebagai penjelmaan dewa Ameraterasu, yang wajib dihormati setiap bangsa dengan ritual Saekere. Keyakinan itu diklaim, karena selama ini Jepang terus menang dalam medan pertempuran. Selain latihan militer, guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi baru tersebut. Pelatihan tersebut dipusatkan di Jakarta. Setiap kabupaten wajib mengirimkan wakilnya untuk mendapat gemblengan langsung dari pimpinan Jepang. Kegiatan penggemblengan ini berlangsung selama tiga bulan. Jangka waktu tersebut dirasa cukup untuk menjepangkan atau me-Nippon-kan para guru (Mustafa & Ally, 1998, hlm. 97).

Oleh karena itu, dalam menyediakan tenaga guru pemerintah Jepang menyediakan kursus, sekolah dan latihan bagi calon guru. Adapun sekolah yang dimaksud bagi calon tenaga pengajar yaitu: (a) Sekolah Guru (SG) atau Sjootoo Sihan Gakkoo, lama belajarnya 2 tahun; (b) Sekolah Guru Menengah (SGM) atau Cutoo Sihan Gakko lamanya 4 tahun; dan (c.) Sekolah Guru Tinggi (SGT) atau Kootoo Sihan Gakkoo, lamanya 6 tahun.

Secara umum, para guru di Jawa diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan atau indoktrinasi. Materi-materi yang diberikan saat pelatihan adalah pendidikan nilai, bahasa, adat istiadat Jepang, nyanyian Jepang, dan latihan pertahanan. Setelah selesai mereka dikembalikan ke daerah-daerah masing-masing (Mustafa & Ally, 1998, hlm. 97).. Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan guru-guru di masyarakat lebih baik dan mendapatkan tempat terhormat.

Hal serupa dialami guru-guru di pesantren. Pada masa ini, pendidikan di Pondok Pesantren Cipasung pimpinan KH Ilyas Ruhiyat, misalnya, dapat dikatakan sedikit lebih maju yaitu dengan adanya keikutsertaan santri putri dalam mengaji kitab besar bersama santri putra. Sebelumnya hal itu mereka hanya dapat mencapai ke kitab-kitab tingkat menengah seperti *al-Fiyyah*. Dengan adanya santri putri yang sudah dewasa, pada tahun 1943 didirikan Kursus kader Mubalighah sebagai wahana latihan berpidato khusus bagi santri putri (*Sejarah Pondok Pesantren Cipasung dari masa ke masa*, 2011).

Kendati kebijakan politik Jepang tampaknya tidak jauh dari skenario yang dibuat intelektual kolonial Belanda Snouck Hurgronje, yaitu memisahkan Islam dari politik praktisnya. Jepang mulai menerapkan pengawasan secara ketat terhadap organisasi-organisasi Islam, terutama terhadap pendidikan Islam. Namun, hal itu paradoks dengan yang pertama, rezim pendudukan Jepang juga membuka peluang bagi pemimpin-pemimpin Islam terlibat dalam organisasi-organisasi politis yang dibentuknya. Dalam memobilisasi Islam Indonesia, pemerintah Jepang menciptakan hubungan yang sangat dekat dengan elite Muslim (Suwendi, 2004, hlm. 85).

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidaklah hanya memenangkan peperangan. Secara konkret tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah menyediakan tenaga cuma-cuma (*rumosha*) dan prajurit-prajurit yang membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Pada akhir zaman Jepang tampak tanda-tanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia. Maka dikerahkan barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama *sedenbu*, untuk menanamkan ideologi baru, untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya. Untuk menyebarkan ideologi dan semangat itu, murid-murid diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran (Mustafa & Ally, 1998, hlm. 103–105).

Di sisi lain pada dasarnya misi penjajahan Jepang tidaklah berbeda dengan Belanda, yaitu misi *gospel, gold, and glory* (penyebaran agama, kekayaan, dan kejayaan/kekuasaan). Hanya saja, karena ditolak dan didemonstrasi oleh para santri, maka usaha men-Shinto-kan masyarakat Indonesia tidak semasif Kristenisasi kaum kolonial Belanda.

Karena ingin menguasai Asia Raya, maka Jepang berusaha melipatgandakan hasil bumi dan pertanian dengan berbagai cara, mulai dari tragedi kemanusiaan seperti

eksploitasi wanita muda hingga kerja paksa. Bagi kalangan pelajar situasi ini memiliki imbas pada proses belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar murid pada saat itu lebih banyak pada hal-hal yang terkait dengan suplai bahan kebutuhan perang. Beberapa kegiatan itu terfokus pada hal-hal berikut ini: (a) murid-murid sering kali diharuskan melakukan *kinrohooshi* (kerja bakti), seperti membersihkan bengkel-bengkel, asrama, kantor-kantor, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kebutuhan militer Jepang di medan perang; (b) murid-murid juga diharuskan membuat rabuk kompos atau secara bersama-sama membasmi hama tikus di sawah. Sebagian waktu belajar juga dihabiskan untuk bercocok tanaman jarak dan tanaman-tanaman lain baik di lingkungan sekolah maupun di pinggir-pinggir jalan, sebagai cara untuk menghasilkan bahan “penting” yang dibutuhkan bagi kelangsungan peperangan; dan (c) latihan-latihan jasmani yang bersifat militerisme. Untuk kegiatan tersebut, dibentuklah barisan-barisan tiap sekolah, yaitu, Seinantai (barisan murid Sekolah Rakyat) dan Gakuto-tai (barisan murid-murid sekolah lanjutan).

Organisasi-organisasi pemuda pelajar itu punya kewajiban melatih pemuda-pemuda latihan-latihan semi militer, baris-berbaris dan latihan perang ala tentara Jepang. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, pada 15 Oktober 1943 Jepang mendirikan *Jawa Ei Giyagen Kambo Renseitai* yang berpusat di Bogor (Tilaar, 1995, hlm. 54).

Mereka yang telah terdidik dan terlatih di lembaga tersebut merupakan para anggota Pembela Tanah Air (PETA). Puluhan ribu pemuda Indonesia dari berbagai daerah, terutama di Jawa dan Sumatera, ikut serta dalam organisasi, yang di kemudian hari jadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dewasa ini (Leirissa, 1985, hlm. 89).

B. Relevansi Pendudukan Jepang atas Pendidikan Islam

Setiap sistem pendidikan mempunyai tujuan dan karakter tersendiri. Demikian pula Pendidikan Islam di masa Jepang. Seperti dijelaskan di muka, bahwa tujuan umum pendidikan pada masa penjajahan Jepang adalah untuk membentuk manusia yang pandai berperang demi pembentukan Asia Timur Raya, dengan Jepang sebagai pimpinannya. Karena itu pula, segala bentuk pengajaran, pelatihan, dan pendidikan diarahkan ke tujuan tersebut.

Model, tujuan dan metode pendidikan pada masa kolonial Jepang pada dasarnya mirip dengan apa yang pernah terjadi pada masa Yunani Kuno. Bentuk dan tujuan pendidikan Sparta diberlakukan oleh rezim tirani militeristis. Pendidikan diberikan sebagai upaya mengarahkan dan menumbuhkan keutamaan moral cinta secara total pada tanah air, menghargai nilai kekuatan dan kekerasan, mengutamakan latihan fisik demi kesiapan tempur, dan ketaatan total pada tanah air (*patria*)

.Pendidikan ala Sparta merupakan awal sebuah kebangkitan kebangsaan yang menjiwai patriotisme di berbagai negara pada zaman ini. Nilai karakter pendidikan Sparta menegaskan, bahwa individu tidak akan dapat sampai pada kesempurnaan

kemanusiaannya jika tidak disertai adanya semangat berkorban terhadap komunitas yang kebajikannya mengatasi kebajikan yang sifatnya individual.

Sebagai proses sejarah dan bagian dari sub sistem, sistem pendidikan di satu masa akan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, sejarah, dan budaya pada masa sebelumnya. Demikian pula halnya sistem pendidikan Islam di masa pendudukan Jepang.

Dalam konteks kekinian, sistem pendidikan Islam di masa sekarang ini, bagaimanapun besar kecil pengaruhnya, terpengaruh oleh sistem pendidikan pada masa sebelumnya, yaitu pada masa penjajahan Jepang.

Seperti dijelaskan Tilaar, bahwa banyak keterkaitan atau hubungan antara sistem pendidikan nasional saat ini dengan di masa penjajahan Jepang. Dalam hal kelembagaan dan penjenjangan tingkatan pendidikan, misalnya, sistem pendidikan nasional mengikuti model atau warisan pendidikan ala Jepang. Yaitu, 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP maupun SMA (Tilaar, 1995, hlm. 52–56).

Selain menegerikan sekolah-sekolah dan sejumlah madrasah, pemerintah juga memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada ormas-ormas Islam maupun sekolah-sekolah swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dengan pengawasan penuh dari pemerintah. Hal ini juga terjadi pada masa pendudukan Jepang.

Di masa penjajahan Jepang pula terjadi demokratisasi pendidikan, di mana pendidikan menjadi hak semua bangsa. Hal tersebut tentu berbeda dengan pada masa penjajahan Belanda, yang hanya memprioritaskan kalangan atau keturunan bangsawan. Di masa kolonial Belanda hanya segelintir orang yang berhak mendapatkan pendidikan (Jalaluddin, 1995).

Dengan demokratisasi pendidikan, maka saat ini semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan dengan layak dan kesempatan yang sama, meskipun pada hal-hal tertentu masih terdapat kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya meski punya kemampuan intelektual yang sama.

Dalam metodologi pembelajaran, sistem pendidikan Islam saat ini terdapat sejumlah keselarasan dengan sistem pendidikan Islam di masa itu, misalnya, metode menghafal, kewiraan, entrepreneurship, vokasi, dan semacamnya.

Sementara dalam hal penanaman nilai-nilai karakter, juga terdapat relevansi yang sangat kuat antara pendidikan Islam masa penjajahan Jepang dengan pendidikan Islam saat ini. Beberapa nilai karakter itu antara adalah cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya.

Penanaman nilai-nilai karakter itu dilakukan dengan pemberian mata pelajaran atau mata kuliah PPKn, Kewiraan, Civic Education, dan lain-lainnya. Demikian pula halnya materi kewirausahaan, pertanian, dan sebagainya, adalah materi-materi yang

dimaksudkan untuk mendidik dan membentuk manusia Indonesia yang mandiri dan bekerja keras sebagaimana dimaksudkan dalam pendidikan Jepang.

Mengenai nasib guru, seperti diuraikan di atas, kondisi guru pada masa pendudukan Jepang lebih baik dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Keberpihakan pemerintah pendudukan Jepang kepada para guru dibuktikan dengan pemberian pelatihan-pelatihan (*training*) dan pendidikan vokasi, meski hal itu dimaksudkan untuk kepentingan politis Jepang. Nasib baik juga dialami para guru (dosen) saat ini. Pemerintah saat ini, tidak saja memberikan sertifikasi, tapi juga memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan tambahan.

Secara umum tujuan pendidikan di masa penjajahan Jepang serupa dengan tujuan pendidikan Sparta, tapi hal tidak serta merta pendidikan Islam kemudian bercorak ala pendidikan Sparta atau sejenisnya. Karena itulah, meskipun dijajah dan dipengaruhi oleh berbagai sistem pendidikan lain pada masa-masa yang berat dan sulit, sistem pendidikan Islam tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan situasi zaman yang terus berkembang.

IV. Kesimpulan

Dengan semboyan Asia untuk bangsa Asia, Jepang mampu menguasai daerah yang hampir seluruh Asia Timur, yang saat itu berpenduduk lebih dari 400 juta jiwa. Kolonialisme Jepang berhasil menundukkan wilayah, politik, ekonomi daerah jajahannya. Selain itu, Jepang juga sukses mengubah tujuan pendidikan Islam dari paradigma tauhid (meraih kebahagiaan dunia-akhirat) menjadi paradigma sekuler. Oleh karena itu, tujuan dan orientasi pendidikan hanya didesain dan dipersiapkan untuk pemenuhan kebutuhan materiil duniawi saja.

Selain ingin memenangkan peperangan, secara konkret tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah menyediakan tenaga cuma-cuma dan prajurit-prajurit yang membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Untuk mencapai hal tersebut, Jepang berusaha dengan sekuat tenaga menjepangkan anak-anak Indonesia. Karenanya, Jepang mengerahkan barisan propaganda yang terkenal dengan nama *sedenbu*, untuk menanamkan ideologi baru, untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya, terutama menghilangkan pendidikan agama (Islam) dari Tanah Air.

Langkah Jepang tersebut dilakukan dengan cara menyebarluaskan ideologi dan semangat Jepang, para guru digembleng secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang. Untuk menanamkan semangat Jepang, murid-murid diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran

Meski demikian, sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman

pemerintahan kolonial Belanda, sehingga pendidikan Islam di masa penjajahan Jepang tetap mampu bertahan dan berkembang.

Hal itu terjadi, karena Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama. Bagi mereka, hal yang penting adalah memenangkan perang dan mendapatkan tenaga kerja ahli atau terampil yang cuma-cuma. Sikap Jepang itu berlainan dengan kolonial Belanda. Selain bertindak sebagai kaum penjajah, Belanda juga punya misi lain, yaitu misi agama Kristen.

Daftar Pustaka

- Adams, C. (2007). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yayasan Bung Karno-Media Pressindo.
- Dhakidie, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, M. (2002). *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan*. Yayasan Al-Mukhtar-Universitas Sriwijaya.
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo.
- Jalaluddin. (1995). *Kapita Selekta Pendidikan*. Kalam Mulia.
- Leirissa, R. Z. (1985). *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Akademika Pressindo.
- Margiono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Mustafa, H. A., & Ally, A. (1998). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. CV. Pustaka Setia.
- Posponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Qomar, M. (2006). *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Erlangga.
- Sejarah Pondok Pesantren Cipasung dari masa ke masa*. (2011). <http://wieursyffa.blogspot.com/2011/03/sejarah-pondok-pesantren-cipasung-dari.html>
- Smith, A. (1980). *The Geopolitics of information*. Oxford University Press.
- Sommerville, D. (2008). *World War II*. Anness Publishing, Ltd.
- Sudjana, N. (1991). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru.
- Sunanto, M. (2007). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suwarno, P. J. (1994). *Hamengku Bowono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*. Kanisius.
- Suwendi. (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional*. PT Gramedia.
- Yunus, M. (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung.
- Zuhairini. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Zuhri, S. (2001). *Guruku Orang-orang Pesantren*. LKIS.